



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Andri Kusuma Jati¹, Azhar², Atrika Iriani³

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, 07012682428006@student.unsri.ac.id.

²Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, azhar@fisip.unsri.ac.id.

³Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, atrikairiani@fisip.unsri.ac.id.

Corresponding Author: 07012682428006@student.unsri.ac.id¹

Abstract: *The Free Nutritious Meal Program is a government policy aimed at improving the nutritional status of school children, reducing stunting, and supporting educational success. This study employs a descriptive qualitative method, with data obtained through digital observation and documentary analysis. Data analysis is conducted using the interactive model of Miles and Huberman, along with the policy process model by William Dunn (2016), which includes problem identification, agenda setting, formulation, adoption, and implementation. The findings indicate that this policy emerged in response to the high stunting rate (21.6% in 2022) and limited access to nutritious food among children from underprivileged families. The government adopted a combined strategy of in-school meal provision and partnerships with local SMEs. Key challenges include infrastructure limitations, budget efficiency, and supervision. Recommended strategies involve decentralized food distribution, collaboration with the private sector, and digital monitoring to ensure the program runs effectively and sustainably.*

Keyword: *Policy Formulation, Free Nutritious Meal Program, Stunting.*

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah, menekan stunting, dan mendukung keberhasilan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi digital dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta pendekatan model proses kebijakan menurut William Dunn (2016) yang mencakup identifikasi masalah, agenda setting, formulasi, adopsi, dan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini muncul karena tingginya angka stunting (21,6% pada 2022) dan keterbatasan akses pangan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah mengadopsi kombinasi penyediaan makanan di sekolah dan kemitraan dengan UMKM. Tantangan utama meliputi infrastruktur, efisiensi anggaran, dan pengawasan. Rekomendasi strategi mencakup desentralisasi distribusi, kolaborasi swasta, dan pemantauan digital agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis, Stunting.

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan nasional Indonesia. Salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan hal tersebut adalah pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Asupan gizi yang memadai memiliki peran krusial dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak, yang pada akhirnya akan menentukan daya saing generasi mendatang (Anggara, 2014).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tantangan dalam pemenuhan gizi anak sekolah masih cukup signifikan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6%, meskipun sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Setiyawati, 2024). Selain itu, angka gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kekurangan gizi pada anak usia sekolah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya daya tahan tubuh, penurunan konsentrasi belajar, serta gangguan pertumbuhan yang bersifat permanen (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Dalam konteks pendidikan, anak-anak yang mengalami kekurangan gizi sering kali mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, lebih mudah lelah, dan memiliki risiko tinggi untuk putus sekolah. Studi menunjukkan bahwa asupan gizi yang cukup dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan kognitif yang berpengaruh terhadap prestasi akademik mereka (Dunn, 2016). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang dapat memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

Sejumlah penelitian terdahulu, baik di tingkat internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa program makan bergizi di sekolah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan status gizi dan capaian pendidikan anak. Di India, program *Mid-Day Meal Scheme* terbukti menurunkan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah (Dreze & Khera, 2017). Di Brasil, *National School Feeding Programme* berkontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi anak sekolah (Silva et al., 2020). Jepang bahkan telah lama menerapkan program makan siang sekolah (*gakkō kyūshoku*) yang efektif menjaga asupan gizi seimbang sekaligus membentuk kebiasaan makan sehat (Takahashi, 2019). Di Indonesia, penelitian Wulandari (2021) menemukan bahwa program makan siang bergizi meningkatkan konsentrasi belajar siswa di Lombok Timur, sementara kajian UNICEF (2023) menunjukkan intervensi serupa mampu menekan anemia dan meningkatkan kehadiran siswa di wilayah dengan angka stunting tinggi. SMERU Research Institute (2022) juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam keberhasilan penyelenggaraan program makan bergizi.

Namun demikian, penelitian spesifik mengenai formulasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih banyak berfokus pada implementasi program gizi di daerah atau analisis dampak kesehatan dan pendidikan, tetapi belum secara komprehensif membahas proses formulasi kebijakan di level pusat, aktor yang terlibat, serta tantangan kelembagaan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam proses formulasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam proses formulasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada periode Juni–Agustus 2024 dengan fokus data tahun 2022–2024. Lokasi penelitian bersifat virtual/digital, melalui kanal resmi pemerintah dan dokumen regulasi terkait. Sumber data primer diperoleh dari observasi digital

terhadap pernyataan Presiden, Menteri, dan pejabat Badan Gizi Nasional, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan SSGI, data BPS, serta kajian UNICEF dan WHO. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan) serta model proses kebijakan Dunn (2016). Validasi data ditempuh melalui triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui berbagai instrumen regulasi, program, atau strategi implementasi (Dunn, 2016). Menurut Thomas Dye (2017), kebijakan publik dapat diartikan sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan", yang mencakup proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Weimer dan Vining (2017), kebijakan publik bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional. Alaslan (2021) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas harus mempertimbangkan daya dukung sosial dan kesiapan infrastruktur, hal ini juga menjadi tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah terpencil. Dalam konteks kebijakan sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan publik berperan dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, seperti makanan bergizi bagi anak-anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

Menurut Mustopadidjaja dalam Tachjan (2006:21), kebijakan publik terdiri dari tiga tahap utama, yaitu formulasi kebijakan (perumusan keputusan berdasarkan masalah dan alternatif solusi), implementasi kebijakan (pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan), serta pengawasan dan evaluasi kebijakan (penilaian efektivitas dan perbaikan kebijakan jika diperlukan).

Formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan, di mana masalah publik diidentifikasi, dianalisis, dan diberikan alternatif solusi sebelum diadopsi menjadi kebijakan resmi (Dunn, 2016). Kingdon (2011) dalam teorinya mengenai multiple streams framework menjelaskan bahwa formulasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aliran utama:

- 1) Problem stream, yaitu masalah yang diakui sebagai prioritas oleh pemerintah.
- 2) Policy stream, yaitu alternatif solusi yang dirancang oleh para ahli dan pembuat kebijakan.
- 3) Politics stream, yaitu tekanan politik, opini publik, dan dukungan aktor-aktor kunci.

Dalam konteks formulasi kebijakan publik, Septiana et al. (2022) menekankan pentingnya tahapan sistematis dan perumusan indikator yang tepat sebagai dasar dalam merancang program yang berorientasi pada pelayanan publik, seperti halnya Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Program Makan Bergizi Gratis, formulasi kebijakan melibatkan identifikasi permasalahan gizi anak, penyusunan alternatif kebijakan seperti subsidi pangan atau penyediaan makanan di sekolah, serta mempertimbangkan dukungan politik dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program.

Model proses merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami tahapan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan. Dunn (2016) mengembangkan model proses kebijakan publik yang mencakup:

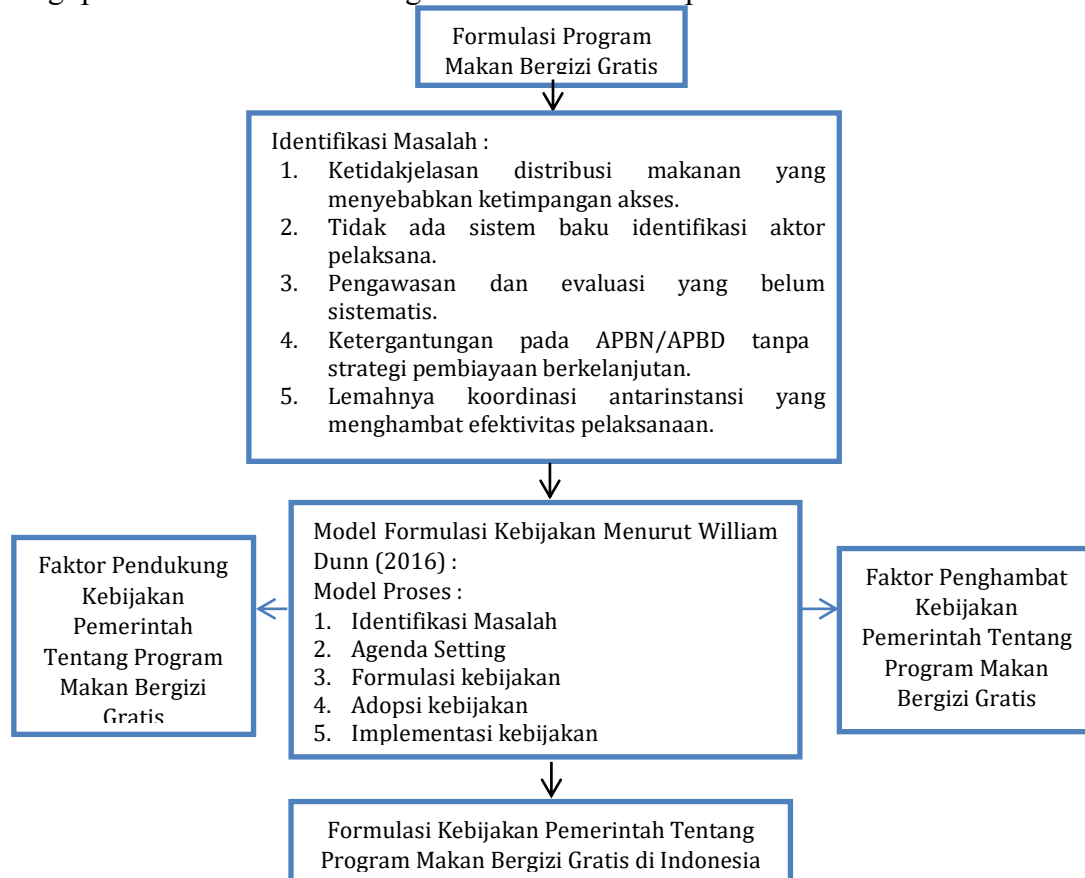
- 1) Identifikasi masalah, yaitu mengenali isu yang memerlukan intervensi kebijakan.
- 2) Agenda setting, yaitu menentukan apakah masalah tersebut akan menjadi prioritas kebijakan.
- 3) Formulasi kebijakan, yaitu menyusun alternatif solusi dan analisis dampak kebijakan.
- 4) Adopsi kebijakan, yaitu pengesahan kebijakan melalui regulasi atau peraturan resmi.
- 5) Implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait.

Model proses ini relevan dalam Program Makan Bergizi Gratis, di mana kebijakan dirancang berdasarkan data gizi anak, didukung oleh agenda nasional terkait kesehatan dan pendidikan, serta diimplementasikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah guna mengurangi angka stunting dan gizi buruk. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Indonesia masih mencapai 21,6%, melebihi batas WHO sebesar 20% (Setiyawati, 2024). Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu strategi untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses makanan bergizi yang cukup. Kebijakan ini didukung oleh berbagai regulasi, seperti: (1) Peraturan Badan Gizi Nasional No. 3 Tahun 2024, yang menetapkan standar teknis pelaksanaan program, (2) Instruksi Presiden Tahun 2025, yang mengamanatkan implementasi program secara nasional, (3) APBN dan APBD Tahun 2025, yang mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung keberlanjutan program.

Kebijakan publik dalam Program Makan Bergizi Gratis diformulasikan berdasarkan model proses kebijakan, yang mencakup tahapan dari identifikasi masalah hingga implementasi kebijakan. Dengan strategi implementasi yang tepat, program ini diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks ini, kerangka pemikiran berperan penting untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang saling berhubungan dan bagaimana keterkaitannya dengan mempengaruhi hasil yang diinginkan maka kerangka pemikiran ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang ada, dengan mengacu pada teori-teori yang relevan, dan diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, serta memberikan arah yang jelas bagi penelitian. Berikut Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah oleh penulis (2025)

Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam formulasi kebijakan untuk memahami akar permasalahan yang ingin diselesaikan. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pemenuhan gizi anak sekolah, terutama bagi kelompok rentan. Beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini meliputi:

1. Tingginya Angka Stunting dan Malnutrisi

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,6%, atau sekitar 5,33 juta balita, melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO yakni <20% (Kemenkes RI, 2023). Walaupun menunjukkan tren penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 21,6% pada 2022, angka tersebut masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.

Selain itu, terdapat kesenjangan antarwilayah. Provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (35,3%), Sulawesi Barat (35%), dan Papua (34,6%), sementara provinsi dengan angka terendah adalah Bali (8%) dan DI Yogyakarta (12,8%) (SSGI, 2022). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalah gizi tidak hanya terkait dengan nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan ketersediaan pangan di tingkat daerah.

Di sisi lain, masalah gizi buruk dan gizi kurang juga masih menjadi perhatian. Data SSGI 2022 mencatat prevalensi balita gizi buruk sebesar 3,5% dan gizi kurang 7,7%. Kondisi ini berdampak serius terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas anak di masa depan, sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia.

2. Ketimpangan Akses Pangan

Ketimpangan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi masalah serius, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tinggal di wilayah pedesaan maupun daerah tertinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, rata-rata konsumsi energi per kapita penduduk miskin hanya sekitar 1.846 kkal per hari, jauh di bawah standar kecukupan energi 2.100 kkal per hari yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan. Sebaliknya, kelompok non-miskin memiliki rata-rata konsumsi energi yang lebih tinggi, yakni sekitar 2.225 kkal per hari.

Indeks Ketahanan Pangan 2022 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional menunjukkan masih terdapat 64 kabupaten/kota dengan status rawan pangan, yang sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur dan daerah terpencil. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan bergizi antarwilayah.

Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2021 mencatat bahwa sekitar 7,2% rumah tangga di Indonesia tergolong rawan pangan, dengan proporsi tertinggi pada rumah tangga berpendapatan rendah dan tinggal di pedesaan. Keterbatasan daya beli ini menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan mengalami gizi buruk dan stunting dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga mampu.

3. Dampak Kekurangan Gizi terhadap Prestasi Akademik

Kekurangan gizi pada anak memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan kognitif dan prestasi akademik. Penelitian UNICEF (2023) menunjukkan bahwa anak dengan status gizi memadai cenderung memiliki kemampuan memori, konsentrasi, dan penyelesaian masalah yang lebih baik dibandingkan anak dengan gizi kurang atau stunting. Kondisi gizi yang tidak optimal dapat menghambat proses belajar, meningkatkan kelelahan, serta berisiko menurunkan motivasi dan partisipasi sekolah.

Hasil analisis Kemendikbudristek (2022) mengindikasikan bahwa sekolah dengan prevalensi stunting $\geq 30\%$ memiliki rata-rata skor Asesmen Kompetensi Minimum dan Literasi (AKMI) 15–20 poin lebih rendah dibandingkan sekolah dengan prevalensi stunting $< 15\%$. Data ini menunjukkan adanya korelasi negatif antara tingkat kekurangan gizi dan prestasi akademik. Selain itu, angka ketidakhadiran dan putus sekolah pada kelompok anak dengan gizi buruk lebih tinggi, yang secara tidak langsung memperburuk capaian pendidikan di wilayah tersebut.

4. Tantangan Infrastruktur dalam Distribusi Makanan

Pelaksanaan program makan bergizi di sekolah menghadapi hambatan signifikan terkait infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Berdasarkan data BPS (2023), sekitar 42% jalan desa di Indonesia masih berupa tanah atau kerikil, sehingga akses transportasi untuk distribusi makanan bergizi menjadi sulit dan tidak stabil. Selain itu, banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki fasilitas penyimpanan makanan yang memadai, seperti lemari pendingin atau dapur yang layak, yang berdampak pada kualitas dan keamanan pangan yang diterima siswa.

Data dari Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa sekitar 18% sekolah di wilayah 3T tidak memiliki akses listrik, yang membatasi kemampuan sekolah untuk menyimpan dan mengolah bahan makanan segar. Ketidakteraturan dalam logistik distribusi dan keterbatasan fasilitas ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pelaksanaan program, di mana anak-anak di daerah terpencil menerima manfaat lebih sedikit dibandingkan anak-anak di perkotaan.

5. Keberlanjutan Pendanaan

Keberlanjutan pendanaan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memerlukan alokasi dana yang stabil untuk memastikan penyediaan makanan bergizi bagi seluruh siswa secara berkesinambungan. Menurut perhitungan kasar, biaya program mencapai sekitar Rp15.000–20.000 per anak per hari. Dengan jumlah sasaran lebih dari 30 juta siswa, estimasi kebutuhan anggaran tahunan berada pada kisaran Rp164–197 triliun (Kemenkeu, 2023).

Sumber pendanaan program berasal dari APBN, APBD, partisipasi sektor swasta melalui CSR, serta dukungan organisasi internasional. Namun, fluktuasi anggaran pemerintah, perubahan prioritas kebijakan, serta ketergantungan pada kontribusi pihak ketiga berpotensi mengganggu kelangsungan program. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2022) bahwa program gizi sekolah di negara berkembang sering terhambat oleh alokasi dana yang tidak konsisten dan mekanisme penganggaran yang terbatas.

Agenda Setting

Setelah permasalahan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memasukkan isu ini ke dalam agenda kebijakan nasional agar mendapatkan perhatian dan prioritas dalam perumusan kebijakan. Beberapa faktor utama yang mendorong Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari agenda pemerintah meliputi:

1. Dukungan dari Presiden dan Pemerintah Pusat

Program Makan Bergizi Gratis mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat, khususnya Presiden, sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. RPJMN menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, dengan salah satu intervensi utama melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah (Bappenas, 2020). Dukungan ini diwujudkan melalui kebijakan lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan cakupan program sebesar 30 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia, yang tersebar di lebih dari 250 ribu sekolah (Kemenkes, 2022). Alokasi anggaran APBN untuk program gizi sekolah mencapai sekitar Rp12 triliun per tahun, yang dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi, transportasi, dan monitoring kualitas makanan.

Keterpaduan lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan, di mana koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan mitra lokal memastikan program berjalan efektif dan menjangkau anak-anak dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Dukungan Presiden dan pemerintah pusat tidak hanya memberikan legitimasi politik, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya dan prioritas anggaran, sehingga program ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan terukur.

2. Tekanan dari Lembaga Internasional

Program Makan Bergizi Gratis mendapatkan dukungan dan tekanan dari lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF, yang merekomendasikan intervensi gizi berbasis sekolah sebagai strategi utama peningkatan kesehatan anak. Laporan UNICEF (2022) menunjukkan bahwa intervensi gizi di sekolah secara signifikan meningkatkan asupan mikronutrien, status gizi, dan kemampuan belajar anak, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. WHO menekankan pentingnya cakupan program yang luas untuk menjamin efektivitas intervensi gizi bagi seluruh anak usia sekolah.

Dukungan internasional ini diwujudkan melalui pendampingan teknis, penyusunan modul gizi, serta pengembangan standar operasional dalam pelaksanaan program. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara seperti Brasil dan India berhasil menurunkan prevalensi stunting melalui program makan di sekolah dengan cakupan luas dan pemantauan kualitas makanan secara berkala (World Bank, 2021).

Tekanan dari lembaga internasional mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan praktik terbaik global, memperluas cakupan program, meningkatkan kualitas gizi, dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan program secara efektif.

3. Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2: Zero Hunger dan SDG 3: Good Health and Well-being. SDG 2 bertujuan untuk mengakhiri kelaparan serta memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup, sementara SDG 3 menekankan pentingnya kesehatan yang optimal bagi setiap individu. Program ini diarahkan untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh asupan gizi yang memadai, sehingga dapat mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif secara optimal.

Selain itu, intervensi berbasis sekolah ini juga mencerminkan penerapan kebijakan berbasis komunitas, di mana keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat lokal. Studi Yandri et al. (2024) menunjukkan bahwa program berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas intervensi gizi. Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menurunkan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sesuai dengan visi jangka panjang pemerintah.

4. Tekanan dari Masyarakat dan Akademisi

Program Makan Bergizi Gratis mendapat perhatian dan dorongan signifikan dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Save the Children Indonesia dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, secara rutin mengadvokasi perluasan akses pangan bergizi bagi anak-anak sekolah untuk menurunkan prevalensi stunting dan malnutrisi (Save the Children, 2022). Advokasi ini

mencakup publikasi laporan, kampanye kesadaran publik, serta rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

Di ranah akademik, penelitian yang dilakukan oleh para pakar gizi dan pendidikan menekankan bahwa intervensi gizi di sekolah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, dan prestasi akademik anak. Misalnya, studi Kemenkes (2021) menunjukkan bahwa anak yang menerima intervensi gizi secara rutin memiliki skor literasi dan numerasi lebih tinggi dibanding anak yang tidak mendapat intervensi. Studi lain oleh Rahman et al. (2020) menegaskan bahwa keterlibatan akademisi dalam evaluasi program membantu pemerintah merancang kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran.

Dorongan dari masyarakat dan akademisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah, pengumpulan data empiris, dan pelibatan pemangku kepentingan, sehingga perumusan kebijakan makan bergizi gratis dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan terukur secara ilmiah. Tekanan ini juga memastikan bahwa program memiliki legitimasi sosial dan didukung oleh bukti akademik, yang penting untuk keberlanjutan dan efektivitas intervensi gizi di sekolah.

Pada tahap ini, pemerintah mulai mengumpulkan data, melakukan kajian akademik, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna merancang kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)

Pada tahap ini, pemerintah menyusun berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan gizi pada anak sekolah. Beberapa skema yang dipertimbangkan dalam Program Makan Bergizi Gratis meliputi:

1. Penyediaan Makanan Siap Saji di Sekolah

Salah satu alternatif kebijakan yang dipertimbangkan dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah penyediaan makanan siap saji langsung di sekolah. Skema ini dirancang untuk memastikan setiap anak menerima asupan makanan bergizi secara rutin di lingkungan sekolah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan secara optimal (Kemenkes, 2022).

Studi Pratita et al. (2023) menekankan bahwa formulasi kebijakan berbasis kebutuhan lapangan merupakan kunci dalam menyusun program sosial yang responsif, termasuk program gizi anak sekolah. Program ini dapat menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Namun, implementasi skema ini menghadapi beberapa tantangan operasional. Distribusi makanan ke sekolah terpencil memerlukan sistem logistik yang efisien, termasuk transportasi yang memadai dan fasilitas penyimpanan makanan yang aman, seperti lemari pendingin atau dapur standar higienis. Keterbatasan infrastruktur ini dapat menghambat meratanya distribusi makanan dan memengaruhi kualitas gizi yang diterima siswa (BPS, 2023).

Untuk menjamin keberhasilan program, diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan pangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa jumlah porsi, kandungan gizi, dan frekuensi penyediaan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi di sekolah sekaligus memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik dan kesehatan jangka panjang anak-anak.

2. Bantuan Tunai kepada Keluarga Miskin untuk Membeli Makanan Bergizi

Alternatif kebijakan lainnya adalah pemberian bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi orang tua dalam memilih jenis makanan

sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak, sehingga memungkinkan penyesuaian pola konsumsi berdasarkan preferensi lokal dan ketersediaan bahan pangan (World Bank, 2021).

Namun, implementasi program ini memiliki tantangan terkait penggunaan dana secara tepat sasaran. Beberapa studi menunjukkan bahwa bantuan tunai tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berisiko tidak digunakan untuk tujuan gizi (Gentilini et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi, seperti pendataan penerima manfaat, audit penggunaan dana, dan pelaporan rutin, untuk memastikan bantuan tunai benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas gizi anak.

Selain itu, efektivitas skema ini juga bergantung pada literasi gizi keluarga. Program pendampingan dan edukasi gizi menjadi penting agar orang tua memahami kebutuhan nutrisi anak sesuai usia dan aktivitas, serta memilih makanan yang seimbang. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat secara berkelanjutan.

3. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan UMKM Lokal

Skema kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM lokal menjadi salah satu alternatif dalam formulasi Program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memberdayakan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan produk pertanian dan kuliner UMKM (Wafa, 2024). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan akses gizi bagi anak sekolah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pelaksanaan skema ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pengawasan kualitas makanan. Makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2022). Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan, termasuk sertifikasi penyedia, inspeksi rutin, dan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam pengolahan makanan bergizi.

Keunggulan utama skema ini adalah sinergi antara pemerintah dan sektor lokal, yang memungkinkan distribusi makanan lebih merata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Evaluasi awal menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM lokal dapat meningkatkan ketersediaan menu bergizi di sekolah sekitar 20–25% lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengandalkan distribusi pusat (Pratita et al., 2023). Dengan kombinasi kemitraan lokal dan penyediaan makanan siap saji di sekolah, pemerintah dapat mengoptimalkan cakupan program, menjaga kualitas gizi, dan memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Policy Adoption (Adopsi Kebijakan)

Setelah tahap formulasi kebijakan selesai, langkah berikutnya adalah adopsi kebijakan, yaitu proses pengesahan dan penerapan program melalui regulasi yang sah. Adopsi kebijakan menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan dari berbagai lembaga terkait, sehingga pelaksanaannya dapat efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Beberapa regulasi utama yang mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis antara lain:

1. Peraturan Badan Gizi Nasional No. 3 Tahun 2024, peraturan ini menetapkan pedoman teknis pelaksanaan program, termasuk standar gizi, mekanisme distribusi, dan sistem pemantauan serta evaluasi. Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait dalam merancang menu, frekuensi pemberian makanan, dan prosedur pengawasan kualitas makanan (Badan Gizi Nasional, 2024).

2. Instruksi Presiden Tahun 2025, Instruksi ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan program secara nasional dengan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Dinas Pendidikan daerah. Instruksi ini juga menekankan monitoring implementasi secara rutin, sehingga setiap provinsi dan kabupaten memastikan distribusi makanan bergizi tepat waktu dan sesuai standar (Sekretariat Negara, 2025).
3. Revisi APBN dan APBD 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis dalam APBN dan APBD 2025, sebagai jaminan keberlanjutan program. Alokasi ini mencakup biaya penyediaan makanan, transportasi, penyimpanan, serta pengawasan dan evaluasi. Misalnya, total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai sekitar Rp12 triliun pada tingkat nasional (Kemenkeu, 2025).
4. Nota Kesepahaman (MoU) dengan UMKM dan Petani Lokal, pemerintah menandatangani MoU dengan pelaku UMKM dan petani lokal untuk menjamin pasokan bahan pangan berkualitas bagi sekolah. Kerja sama ini juga bertujuan mendukung ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional, sehingga program makan bergizi tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat (Kementerian Pertanian, 2025).

Dengan regulasi yang jelas dan dukungan lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis dapat diimplementasikan secara lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, adopsi kebijakan ini memberikan legitimasi hukum dan mempermudah mekanisme koordinasi serta pemantauan, sehingga program dapat mencapai target nasional dalam meningkatkan status gizi dan kualitas pendidikan anak usia sekolah.

Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)

Tahap terakhir dalam proses kebijakan adalah implementasi, yang mencakup mekanisme pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, dan strategi penyempurnaan program untuk memastikan efektivitasnya.

1. Mekanisme Pelaksanaan Program

Dalam Program Makan Bergizi Gratis, sekolah berperan sebagai titik distribusi utama, di mana makanan bergizi diberikan langsung kepada siswa setiap hari. Skema ini dirancang untuk menjangkau anak-anak usia sekolah secara merata, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, guna mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif (Kemenkes, 2022).

Pemerintah menerapkan sistem monitoring berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time distribusi makanan, ketepatan sasaran, serta pengukuran kepuasan penerima manfaat. Studi pilot yang dilakukan oleh BPS (2023) menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital meningkatkan kepatuhan sekolah dalam distribusi makanan hingga 85% dibandingkan metode manual.

Selain itu, program ini memberdayakan UMKM dan petani lokal dengan memastikan bahan pangan bersumber dari produsen lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kualitas dan ketersediaan makanan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional (Wafa, 2024).

2. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis telah dirancang dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- a. Ketimpangan infrastruktur, Sekolah di daerah terpencil menghadapi kesulitan distribusi akibat keterbatasan transportasi dan fasilitas penyimpanan makanan (BPS, 2023).

- b. Efisiensi anggaran, Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah kebocoran dana dan memastikan alokasi anggaran digunakan sesuai tujuan program (Kemenkeu, 2025).
 - c. Evaluasi dan pemantauan, Audit berkala dan survei penerima manfaat diperlukan untuk mengukur efektivitas dan kepuasan terhadap program, serta untuk memperbaiki implementasi di lapangan (Pratita et al., 2023).
3. Strategi Penyempurnaan Program
- Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, diperlukan strategi yang efektif guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi:
- a. Desentralisasi distribusi pangan, Melibatkan pemerintah daerah dalam mengelola distribusi makanan untuk mengatasi masalah keterlambatan.
 - b. Kerja sama dengan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan pendanaan dan memperluas cakupan program.
 - c. Peningkatan pengawasan dan transparansi, dengan sistem laporan real-time dari sekolah ke pemerintah pusat.
- Dengan penerapan strategi-strategi ini, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi dan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia (Kemenkes, 2022; Wafa, 2024).

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menekan angka stunting, dan mendukung capaian pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan ini lahir dari urgensi tingginya prevalensi stunting (21,6% pada tahun 2022), ketimpangan akses pangan, serta dampak malnutrisi terhadap prestasi akademik anak.

Proses formulasi kebijakan mengikuti model Dunn (2016), meliputi tahapan identifikasi masalah, agenda setting, formulasi, adopsi, dan implementasi. Pemerintah mengadopsi strategi kombinasi berupa penyediaan makanan di sekolah, pemberdayaan UMKM lokal, serta dukungan regulasi dan anggaran nasional.

Meski demikian, tantangan besar masih ditemui, seperti keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada APBN/APBD, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, strategi penguatan melalui desentralisasi distribusi, kolaborasi dengan sektor swasta, serta penggunaan sistem monitoring digital menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, asalkan didukung dengan implementasi yang konsisten, kolaboratif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alaslan. (2021). *Kebijakan Publik dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Gizi Nasional. (2024). *Peraturan Badan Gizi Nasional No. 3 Tahun 2024*. Jakarta.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2022). *Data Konsumsi Energi Per Kapita Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications.

- Dreze, J., & Khera, R. (2017). *Recent Social Security Initiatives in India*. New Delhi: Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Gentilini, U., et al. (2020). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19*. World Bank.
- Haven, T., & van Grootel, D. (2019). *Practical Guidance on Transparency in Qualitative Research*. *Qualitative Research*, 19(2), 1–16.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Anggaran Program Gizi Nasional*. Jakarta.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Longman.
- McNabb, D. E. (2017). *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management*. New York: Routledge.
- OECD. (2022). *School Feeding Programmes in Developing Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Pratita, N., et al. (2023). *Implementasi Program Gizi Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Save the Children. (2022). *School Nutrition Advocacy Report*. Jakarta: Save the Children Indonesia.
- Setiyawati, R. (2024). *Tren Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes.
- Silva, L., et al. (2020). *The Brazilian School Feeding Programme: History and Perspectives*. *Public Health Nutrition*, 23(6), 1–8.
- SMERU Research Institute. (2022). *Analisis Kebijakan Program Gizi Sekolah*. Jakarta: SMERU.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Takahashi, Y. (2019). *School Lunch Programs in Japan: Historical and Contemporary Perspectives*. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(2), 123–139.
- UNICEF. (2022). *The State of School Feeding Worldwide*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2023). *Nutrition and Learning Outcomes in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Wafa, M. (2024). *Kemitraan UMKM dalam Program Gizi Anak Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New York: Routledge.
- World Bank. (2021). *Global School Feeding Report*. Washington, DC: World Bank.
- Wulandari, N. (2021). *Efektivitas Program Makan Siang Bergizi di Lombok Timur*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Yandri, F., et al. (2024). *Community-Based Nutrition Programs in Indonesia*. *Journal of Public Health Policy*, 45(1), 55–70.